

ABSTRAK

Lita Aulia Trianasari, 17104163072, Analisa Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing Prof. Dr. KH. A. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.

Kata kunci : Penanggulangan, Penjualan Minuman Beralkohol, Ilegal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak penjualan minuman beralkohol ilegal yang tidak mempunyai perizinan SIUP-MB di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kalangan remaja dan atau pelajar.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan penjualan minuman beralkohol illegal di Desa Besole, lalu dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif? 3) Bagaimana penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, 2) Untuk menganalisis penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif, 3) Untuk menganalisis penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari Sumber data primer dan Sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan kehadiran dan triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Penanggulangan terhadap penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada warung dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Aparat penegak hukum juga melakukan pengawasan baik intern maupun *ekstern* guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap peredaran minuman beralkohol. Adapun kendala yang

menghambat upaya penanggulangan antara lain: Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol dengan mengelabuhi pihak kepolisian, Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya, koordinasi aparat penegak hukum yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal, kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia, peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera.

2) Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa Pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol ditempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran dengan demikian keberadaan minuman beralkohol tidak disalah gunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat tetap terjaga. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP. Mesti sudah diketahui akan dampak negatif dari minuman beralkohol tersebut masih banyak pihak yang menjual minuman tersebut dan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dirasa kurang memberi efek jera.

3) Dalam penanggulangan terhadap minuman beralkohol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan kaidah hukum islam namun masih kurang efektif karena masih saja masyarakat tidak mau menaati peraturan daerah yang ada. Sudah dijelaskan bahwa khamar adalah induk keburukan (*ummul khobaits*) yang mengakibatkan seseorang berbuat kejahatan dan kerusakan dalam masyarakat. Minuman khamar diharamkan atas dasar ayat Al-qur'an dan hadist. Sesuai dengan kaidah fiqih *saad dzariah* yaitu tindakan pencegahan yang menyebabkan ketergantungan dan bisa memabukkan sehingga lebih baik untuk menghindari mudharatnya karena dari segi manfaatnya tidak ada. *Muhtasib*/aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat dan tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.

ABSTRACT

Lita Aulia Trianasari, 17104163072, Analysis of the Countermeasures for the Sale of Illegal Alcoholic Drinks (Case Study in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, IAIN Tulungagung, 2021, Advisor: Prof. Dr. KH. A. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.

Key words: Prevention, Sales of Alcoholic Drinks, Illegal

This research is motivated by the many sales of illegal alcoholic drinks that do not have a SIUP-MB license in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency and selling alcoholic drinks secretly which have a negative impact on the environment, especially for teenagers and / or students.

The focus in this research is about how law enforcement efforts to combat the sale of illegal alcoholic drinks in Besole Village, then with the following research questions: 1) How to overcome the sale of alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency? 2) How is the sale of illegal alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency from a positive legal perspective? 3) How is the sale of illegal alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency from the perspective of Islamic law? The objectives of this study are: 1) To describe the prevention of the sale of alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency, 2) To analyze the sale of illegal alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency in a positive legal perspective, 3) To analyze the sale of alcoholic drinks illegal in Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency from the perspective of Islamic law.

his research method uses a type of qualitative research using the juridical empirical method. Sources of data used in this study were taken from primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used in this study were observation, in-depth interviews and documentation. While the analysis technique uses qualitative descriptive analysis techniques, where in this model there are three components of the analysis, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity checks using attendance extension and triangulation.

The results of this study are: 1) Countermeasures against the sale of alcoholic drinks in Besole Village, Besuki District have been carried out but have not been effective because there are still stalls and / or retailers that still sell alcoholic drinks without having a license to sell alcoholic drinks (SIUP-MB). Law enforcement officials also carry out both internal and external supervision in order to prevent irregularities or irregularities in the circulation of alcoholic drinks. The obstacles that hinder efforts to overcome include: The smarter parties who sell and buy or produce alcoholic drinks by tricking the police, Sometimes there are also people who protect the seller even though he has been proven to own or store goods at his home, coordination of law enforcement officials who have not It is established and runs optimally, the next obstacle is the limited facilities available,

the regional regulation has not regulated the issue of adequate sanctions or threats, so that the sanctions in the regional regulation seem less firm and have not provided a deterrent effect. 2) In the implementation of this alcoholic drink trade, it is stipulated that the Government in Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Control and Supervision of the Circulation of Alcoholic Drinks in Tulungagung Regency prohibits the distribution and or selling of alcoholic drinks in public places, and adjacent to places of worship, schools, hospitals. and others except in hotels, bars, pubs and restaurants, thus the existence of alcoholic drinks is not misused by the community so that public order is maintained. Every company that conducts the distribution and / or sale of alcoholic drinks of class B and / or class C is required to have a SIUP-MB. Every company that carries out business activities of circulating and / or selling alcoholic drinks class A is required to have a SIUP. It must be known that the negative impact of alcoholic drinks is that there are still many parties who produce these drinks and the sanctions in Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Control and Supervision of the Circulation of Alcoholic Drinks in Tulungagung Regency are deemed less deterring. 3) In the prevention of alcoholic drinks carried out by law enforcement officials, it is in accordance with the principles of Islamic law but it is still not effective because the community still does not want to obey existing regional regulations. It has been explained that khamar is the mother of evil (*ummul khobaaits*) which causes a person to commit crimes and damage in society. Drinking khamar is forbidden on the basis of the verses of the Al-quran and hadith. In accordance with the rules of fiqh saad dzariah, namely preventive measures that cause dependence and can be intoxicating so it is better to avoid the harm because in terms of benefits there are no. *Muhtasib* / law enforcement apparatus has the obligation to regulate public order, prevent violations of the rights of neighbors, oversee the application of laws in society and the main task of these institutions is to invite people to do good and prevent people from committing evil deeds.

الملخص

لينا اوليا تريناساري ، ١٧١٠٤١٦٣٠٧٢ ، تحليل الإجراءات المضادة لبيع المشروبات الكحولية غير القانونية (دراسة حالة في قرية بيسولي ، مقاطعة بيسوكى ، تولونغاغونغ ريجنسى) ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة والقانون ، إيان تولونغاغونغ ، ٢٠٢١ ، مستشار الأستاذ. دكتور. ح.أ. حسيم نواوى ، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: منع ، بيع مشروبات كحولية ، غير قانوني

هذا البحث مدفوع بالعديد من مبيعات المشروبات الكحولية غير القانونية التي لا تحمل ترخيص سانياوص- ماب في قرية بيسولي ، منطقة بيسوكى ، منطقة تولونغاغونغ ريجنسى وبيع المشروبات الكحولية سراً والتي لها تأثير سلبي على البيئة ، خاصة للمرأهقين و / أو الطلب

يركز هذا البحث على: (١) كيفية التغلب على بيع المشروبات الكحولية في قرية بيسولي ، مقاطعة بيسوكى ، مقاطعة تولونغاغونغ؟ (٢) كيف يتم بيع المشروبات الكحولية غير القانونية في قرية بيسولي ، مقاطعة بيسوكى ، تولونغاغونغ ريجنسى من منظور قانوني إيجابي؟ (٣) كيف يتم بيع المشروبات الكحولية غير المشروعة في قرية بيسولي ، مقاطعة بيسوكى ، تولونغاغونغ ريجنسى من منظور الشريعة الإسلامية؟

يستخدم أسلوب البحث هذا نوعاً من البحث النوعي باستخدام المنهج القانوني التجريبى. تمأخذ مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات المعمقة والتوثيق. بينما تستخدم تقنية التحليل تقنيات التحليل الوصفي النوعي ، حيث يوجد في هذا النموذج ثلاثة مكونات للتحليل ، وهي: تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. التحقق من صحة البيانات باستخدام تمديد الحضور والتثليل

نتائج هذه الدراسة هي: (١) تم تنفيذ الإجراءات المضادة ضد بيع المشروبات الكحولية في قرية بيسولي بمنطقة بيسوكى لكنها لم تكن فعالة لأنها لا تزال هناك أشكال و / أو تجار تجزئه لا يزالون بيعون المشروبات الكحولية دون الحصول على ترخيص لبيع المشروبات الكحولية (ساناياوص-ماب). يقوم مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا بالإشراف الداخلي والخارجي من أجل منع المخالفات أو المخالفات في تداول المشروبات الكحولية. تشمل العقبات التي تعيق الجهود المبذولة للتغلب عليها: الأطراف الأكثر ذكاءً الذين يبيعون ويشترون أو ينتجون المشروبات الكحولية عن طريق خداع الشرطة ، وأحياناً يكون هناك أيضًا أشخاص يحمون البائع على الرغم من ثبوت امتلاكه أو تخزين البضائع في منزله ، والتيسير بين مسؤولي إنفاذ القانون الذين لم يفعلوا ذلك. تم تأسيسها وتشغيلها على النحو الأمثل ، والعقبة التالية تتعلق بالمرافق المحدودة المتأخرة ، ولم تنظم اللوائح الإقليمية مسألة العقوبات أو التهديدات المناسبة ، بحيث تبدو العقوبات في اللوائح الإقليمية أقل صرامة ولم تقدم تأثيراً رادعاً. (٢) في تنفيذ تجارة المشروبات الكحولية هذه ، ينص على أن الحكومة في اللائحة الإقليمية رقم ٤ لعام ٢٠١١ بشأن التحكم والإشراف على تداول المشروبات الكحولية في منطقة تولونغاغونغ ريجنسى تحظر توزيع و / أو بيع المشروبات الكحولية في الأماكن العامة ، وبجوار أماكن العبادة والمدارس والمستشفيات. وغيرها باستثناء الفنادق والحانات والمطاعم ، بحيث لا يسيء المجتمع استخدام المشروبات الكحولية لحفظ على النظام العام. يتبع على كل شركة تقوم بتوزيع و / أو بيع المشروبات الكحولية من الفئة ب و / أو الفئة ج أن يكون لديها سانياوص-ماب. يتبع على كل شركة تقوم بأنشطة تجارية لتداول و / أو بيع المشروبات الكحولية من الفئة أ أن يكون لديها سانياوص. يجب أن نعلم أن التأثير السلبي للمشروبات الكحولية هو أنه لا يزال هناك العديد من الأطراف التي تنتج هذه المشروبات والعقوبات الواردة في اللائحة الإقليمية رقم ٤ لعام ٢٠١١ بشأن التحكم والإشراف على تداول المشروبات الكحولية في منطقة تولونجاجونج تعتبر أقل ردعًا. (٣) في الوقاية من المشروبات الكحولية التي يقوم بها المسؤولون عن إنفاذ القانون ، فهي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولكنها لا تزال غير فعالة لأن المجتمع لا يزال لا يريد الانصياع للوائح الإقليمية القائمة. وقد أوضح أن خمار هي أم الشر التي تجعل الإنسان يرتكب جرائم ويضر المجتمع. يحرم شرب الخمار بأيات القرآن والحديث. وفقاً لقواعد فقه سعد الدزايرية ، وهي الإجراءات الوقائية التي تسبب التبعية ، ويمكن أن تكون مسكنة ، فالأخلى تجنب الضرر ، لأنه من حيث الفوائد لا يوجد. يجب على المحتبس / جهاز إنفاذ القانون تنظيم النظام العام ، ومنع انتهاك

حقوق الجيران ، والإشراف على تطبيق القوانين في المجتمع ، والمهمة الرئيسية لهذه المؤسسات هي دعوة الناس لفعل الخير ومنع الناس من ارتكاب السيئات